



## Analisis Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Maluku

Wicky Aulele<sup>1\*</sup>, Yerimias Manuhutu<sup>2</sup>, Izaak Tonny Matitaputty<sup>3</sup> Sondang Siahaan<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pattimura, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Perdagangan Internasional, Universitas Pattimura, Indonesia

Email: [wickyaulele@gmail.com](mailto:wickyaulele@gmail.com)<sup>1</sup>, [jerimias\\_manuhutu@yahoo.co.id](mailto:jerimias_manuhutu@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [tonnymatitaputty@gmail.com](mailto:tonnymatitaputty@gmail.com)<sup>3</sup>, [Sondang03siahaan@gmail.com](mailto:Sondang03siahaan@gmail.com)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [wickyaulele@gmail.com](mailto:wickyaulele@gmail.com)

**Abstract.** *This research is motivated by the problem of the open unemployment rate in Maluku Province which is still fluctuating, where the influence of human capital indicators such as the Average Years of Schooling and the Gross Enrollment Rate of Senior High Schools as well as economic policies such as the Provincial Minimum Wage often show results inconsistent with theory, thus requiring further empirical studies to determine their influence in the region. The purpose of this study is to analyze and determine the partial and simultaneous effects of the average years of schooling, the gross enrollment rate of senior high schools, and the provincial minimum wage on the open unemployment rate in Maluku Province. The method used is quantitative with secondary data in the form of time series from 2015 to 2024 sourced from the Central Statistics Agency (BPS) of Maluku Province, and analyzed using multiple linear regression techniques. The results show that the average years of schooling have a negative and significant effect, while the gross enrollment rate of senior high schools and the provincial minimum wage each have a positive insignificant and negative insignificant effect on the open unemployment rate. Simultaneously, the three variables also have no significant effect. The implications of these findings confirm that increasing the average length of schooling is a key factor in reducing unemployment, but policies related to minimum wages and high school participation need to be reviewed and combined with other policies to be more effective in addressing unemployment in Maluku Province.*

**Keywords:** *Average Years Schooling; Gross Enrollment Rate; High School; Open Unemployment Rate; Provincial Minimum Wage.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku yang masih fluktuatif, di mana pengaruh indikator modal manusia seperti Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Kasar SMA serta kebijakan ekonomi seperti Upah Minimum Provinsi sering kali menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan teori, sehingga memerlukan kajian empiris lebih lanjut untuk mengetahui pengaruhnya di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan dari rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar SMA, dan upah minimum provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder berupa time series dari tahun 2015 hingga 2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, serta dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan, sementara angka partisipasi kasar SMA dan upah minimum provinsi masing-masing berpengaruh positif tidak signifikan dan negatif tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga tidak berpengaruh signifikan. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah merupakan faktor kunci dalam menekan pengangguran, namun kebijakan terkait upah minimum dan partisipasi sekolah menengah atas perlu dikaji ulang serta dikombinasikan dengan kebijakan lain agar lebih efektif dalam mengatasi pengangguran di Provinsi Maluku.

**Kata kunci:** Angka Partisipasi Kasar; Rata-Rata Lama Sekolah; Sekolah Menengah Atas; Tingkat Pengangguran Terbuka; Upah Minimum Provinsi.

### 1. LATAR BELAKANG

Ketenagakerjaan selalu merupakan isu krusial yang dihadapi setiap bangsa, khususnya di hampir seluruh nusantara, termasuk wilayah Maluku. Daerah Maluku merupakan gugusan kepulauan yang secara geografis terkendala oleh sarana dan prasarana yang belum memadai.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kualitas pendidikan para pencari kerja, yang membuat mereka sulit terserap di pabrik atau sektor manufaktur. Sementara itu, industri mensyaratkan standar ijazah tertentu dengan upah regional yang telah ditetapkan cukup tinggi, alhasil hal ini memicu lonjakan angka tanpa pekerjaan di antara penduduk yang minim bekal pendidikan. Konsekuensinya, menjadi kewajiban bagi pemerintah setempat, terutama di Maluku, untuk mengambil peran sentral dalam merumuskan jalan keluar bersama demi terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga (Adi & Suherman, 2021)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Maluku (2015–2024) mengalami fluktuasi dan tren Penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Maluku selama periode 2015–2024 menunjukkan pola fluktuatif, dengan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, TPT Maluku mencapai angka tertinggi sebesar 9,93%, yang disebabkan oleh tingginya jumlah tenaga potensial yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Tahun 2016 mencatat penurunan signifikan sebesar 2,88% berkat penyerapan tenaga kerja di sektor jasa (46,82%), sektor primer (39,13%), dan sektor industri (14,05%).

Memasuki tahun 2017, TPT kembali meningkat sebesar 2,24% akibat tingginya pengangguran pada penduduk usia muda, terutama kelompok umur 20-24 tahun yang mencapai 33,35%. Namun, tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 2,02% seiring bertambahnya jumlah penduduk bekerja sebanyak 58.082 orang. Penurunan berlanjut pada tahun 2019 sebesar 0,19%, didorong oleh program pemerintah seperti peningkatan kualitas pendidikan dan investasi berkelanjutan.

Memasuki periode 2021-2024, TPT di Maluku cenderung menurun. Menurut BPS tahun 2024, tren ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, yang berdampak pada stabilnya pasar tenaga kerja dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini menandakan pentingnya peran pemerintah dalam mempertahankan dan memperkuat tren positif penurunan pengangguran di Maluku.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Maluku menunjukkan tren peningkatan konsisten selama periode 2015-2024, dari 76,33% menjadi 85,50%. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pendidikan yang lebih tinggi membuka peluang lebih besar bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan jenjang karier yang lebih baik, sehingga menjadi jembatan utama menuju pasar tenaga kerja.

Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas (APK SMA) di Provinsi Maluku mengalami pola yang berbeda. Pada tahun 2015, APK SMA cukup tinggi, yaitu 95,13%, tetapi

sempat menurun drastis di tahun 2017 dan 2018 menjadi 89,71% dan 87,15%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh tingginya angka putus sekolah setelah jenjang SMP atau kurangnya daya tarik pendidikan SMA bagi sebagian masyarakat. Namun, sejak tahun 2019, APK SMA kembali meningkat dan stabil di kisaran 95-96% hingga tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan daya tampung SMA, program beasiswa, atau kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menengah mulai membuahkan hasil.

Upah Minimum Provinsi (UMP) di Maluku menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami stagnasi pada periode 2020–2021 akibat kebijakan pemerintah merespons lesunya perekonomian nasional imbas pandemi Covid-19. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020, UMP tahun 2021 ditetapkan sama dengan tahun 2020, yakni sebesar Rp2.604.961. Sebelumnya, UMP Maluku terus meningkat dari Rp1.650.000 pada tahun 2015 menjadi Rp2.400.664 pada tahun 2019. Memasuki tahun 2022–2024, UMP kembali mengalami kenaikan seiring pemulihan ekonomi.

Meskipun perkembangan indikator pendidikan serta Upah Minimum Provinsi (UMP) terlihat membaik, pengaruh nyata kedua variabel tersebut dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Maluku masih membutuhkan pemeriksaan yang lebih seksama. Beberapa studi terdahulu telah menyajikan temuan yang bervariasi. (Triantoro, 2021) di Bandar Lampung mendapati bahwa UMP sama sekali tidak berdampak pada tingkat pengangguran terbuka. Sebaliknya, (Belinda, 2023) di Jawa Tengah menyimpulkan bahwa UMP justru memberikan kontribusi yang signifikan dan positif terhadap pengangguran. Sementara itu, (Suryana & Pradana, 2023) di wilayah Pulau Jawa menemukan bahwa rasio partisipasi kasar sekolah menengah atas tidak memengaruhi pengangguran terbuka. Kondisi ini menggarisbawahi perlunya telaah lebih jauh untuk memahami secara akurat apa saja yang memengaruhi tingkat pengangguran di Maluku dalam konteks wilayah tersebut.

Maka dari itu, maksud dari penelitian ini adalah mengkaji secara utuh kaitan antara indikator kemajuan masyarakat, khususnya sektor pendidikan, dan besaran upah terhadap jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Maluku. Penelitian ini memanfaatkan indikator pendidikan yang lebih terperinci, yakni Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), yang akan diuji bersamaan dengan Upah Minimum provinsi demi cakupan yang lebih luas. Berbeda dengan studi terdahulu yang cenderung fokus pada satu indikator pendidikan saja dan sering dilakukan di wilayah yang sudah lebih maju, studi ini secara spesifik diarahkan untuk Provinsi Maluku, mengingat daerah kepulauan ini memiliki dinamika ketenagakerjaan yang agak berbeda.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah tolok ukur krusial guna mengevaluasi derajat pendidikan dalam suatu populasi. RLS merefleksikan periode tahun yang dilalui seseorang dalam sistem pendidikan formal, mencakup jenjang dasar sampai dengan tingkat atas atau lebih lanjut (Indrawati & Harsono, 2025). Selain itu, RLS kerap digunakan guna mengkaji perkembangan pendidikan antar wilayah maupun negara yang berbeda.

Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, umumnya makin bertambah pula wawasan serta kompetensinya, membuka lebih banyak kesempatan kerja, dan kecil kemungkinan terjerat pengangguran. Sebaliknya, jika pendidikan kurang memadai, hal itu bisa mengakibatkan persaingan yang kurang kompetitif di bursa kerja (Aqilah et al., 2024).

Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Gillis dalam (Susanto & Pangesti, 2019) yang mengemukakan dua alasan utama mengapa pendidikan itu penting. Pertama, terdapat permintaan besar terhadap pendidikan karena mayoritas orang meyakini bahwa schooling yang berkualitas pasti mendatangkan keuntungan. Kedua, temuan berbagai studi memperlihatkan bahwa capaian pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan dan kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat.

Menurut Perspektif Teori Modal Manusia, pendidikan dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki individu. Melalui pendidikan, seseorang memperoleh pendalaman pemahaman di area spesifik, sehingga ia mampu menguasai keahlian memecahkan persoalan serta kapasitas besar dalam menghasilkan komoditas dan layanan. Lulusan universitas biasanya menikmati upah lebih besar ketimbang lulusan sekolah menengah atas. Orang dengan tingkat pendidikan tinggi punya spektrum pilihan pekerjaan yang lebih luas dan angka tanpa kerja di kelompok ini umumnya lebih rendah (Afifah & Hanifa, 2022).

Junaidi dan Zulfanetti (2016) menguraikan bahwa terwujudnya target pembangunan sektor pendidikan akan menyempurnakan mutu serta efisiensi daya guna masyarakat, di mana peningkatan daya guna penduduk akan menjadi motor penggerak utama (*engine of growth*) bagi kemajuan ekonomi dan taraf hidup warga. Investasi di bidang pendidikan mampu meningkatkan kualitas SDM, yang termanifestasi lewat kemajuan pengetahuan dan keterampilan yang selanjutnya akan mendorong hasil kerja. Individu dengan efisiensi kerja tinggi cenderung memperoleh penghasilan yang lebih baik dan akhirnya akan menikmati peningkatan kesejahteraan serta terhindar dari belenggu kemiskinan (Rahim et al., 2024)

### **Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas (APK SMA)**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ([bps.go.id](http://bps.go.id)), mengartikan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai selisih antara jumlah penduduk yang masih menjalani studi di jenjang menengah atas dibandingkan dengan total populasi yang seharusnya berada dalam rentang usia resmi untuk jenjang tersebut (yaitu umur 16-18 tahun). APK SMA sangat krusial untuk mengukur seberapa luas peluang masyarakat guna mengikuti pendidikan di jenjang menengah atas dalam suatu bangsa. Kenaikan nilai APK SMA menandakan semakin terbuka lebar peluang dan akses warga untuk berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas, yang kemudian berimplikasi baik bagi kemajuan daya pikir, kondisi ekonomi, serta tatanan sosial negara tersebut (Suryana & Pradana, 2023).

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara total siswa yang tengah menempuh pendidikan pada jenjang tertentu dengan jumlah penduduk yang semestinya berusia tepat untuk tingkatan pendidikan itu (Rahmadina et al., 2021). Lebih jauh, indikator ini merefleksikan keterlibatan populasi pada jenjang pendidikan spesifik tanpa memandang batasan usia. Besaran nilai APK bahkan dapat melampaui angka seratus persen, disebabkan oleh kenyataan bahwa kuantitas pelajar pada jenjang tersebut dapat meliputi anak-anak yang usianya berada di luar batas ketentuan. Fenomena ini dipicu oleh beberapa sebab, misalnya masuknya siswa yang usianya lebih muda, adanya keterlambatan dalam proses pendaftaran siswa, atau kemungkinan siswa mengulang kelas.

### **Upah Minimum Provinsi (UMP)**

Regulasi mengenai upah terendah yang ditetapkan pemerintah dimaksudkan guna mendongkrak taraf hidup para pekerja. Dalam penetapan upah minimum, pertimbangan mengenai daya hasil kerja serta perkembangan ekonomi turut diperhitungkan agar selaras dengan kondisi berbagai perusahaan. Terdapat dua klasifikasi penetapan upah, yakni Upah Minimum Kawasan dan upah minimum tingkat provinsi. Upah Minimum Kawasan berlaku hanya di wilayah spesifik, sementara upah minimum provinsi mencakup semua wilayah kabupaten dan kota dalam lingkup provinsi tersebut (Sisnita & Nano, 2017).

Menurut (Gani, 2015) beberapa konsep dasar melandasi penentuan upah. Konsep-konsep tersebut meliputi:

1. Teori Upah Normal (David Ricardo): Konsep ini menentukan besaran upah berdasarkan biaya hidup paling dasar yang diperlukan oleh para buruh. Pandangan ini menekankan bahwa kompensasi yang dibayarkan oleh pemilik usaha harus sepadan dengan kemampuan finansial mereka.
2. Teori Undang-Undang Upah Besi (Lasalle): Konsep ini mengemukakan bahwa skema upah

biasa hanya menguntungkan pihak pemberi kerja, menyebabkan posisi pekerja menjadi kurang menguntungkan.

3. Teori Dana Upah (Stuart Mill Senior): Konsep ini menyatakan bahwa jumlah bayaran pekerja berkaitan erat dengan keseluruhan alokasi dana upah yang tersedia dalam komunitas. Jika total dana besar, upah akan meningkat; sebaliknya, saat dana minim, upah akan menurun. Akibatnya, usaha untuk menuntut peningkatan upah dianggap kurang berdampak.
4. Teori Upah Etika: Konsep ini tidak memfokuskan pada jumlah nominal upah, melainkan pada kelayakan bayaran agar mampu menutupi kebutuhan sehari-hari pekerja beserta keluarganya. Pandangan ini menganjurkan adanya penyediaan dana khusus oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendukung buruh dengan tanggungan keluarga yang banyak.
5. Teori Upah Diskriminasi: Konsep ini memperlihatkan bahwa besaran upah kerap berbeda akibat berbagai unsur seperti gender, etnis, tingkat pendidikan, kemampuan, serta jenis pekerjaan, yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan dalam pembayaran gaji.

### **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Menurut Rafi (2023) ketidakseimbangan antara ketersediaan pekerjaan dan jumlah orang yang bersedia bekerja pada level gaji serta harga pasar saat ini menjadi penyebab utama tingginya angka pengangguran.

Individu yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya, baik pekerjaan penuh waktu maupun tidak penuh waktu, dikategorikan sebagai pengangguran terbuka (Mustakim et al., 2022). Lebih lanjut, perkembangan teknologi yang cenderung mengurangi kebutuhan akan sumber daya manusia juga dapat memicu munculnya pengangguran terbuka. Menurut Mankiw (2007) menjabarkan bahwa persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diukur melalui rumus berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\% \quad (1)$$

Angkatan Kerja : Bekerja + Pengangguran

masalah pengangguran diyakini bisa diatasi melalui sisi suplai dan mekanisme penyesuaian harga di pasar yang berjalan bebas guna memastikan daya serap permintaan tetap seimbang dengan suplai (Badria, 2021). Lebih lanjut, apabila terjadi lonjakan penawaran tenaga kerja, upah cenderung turun, yang mana hal ini akan membuat output produksi perusahaan berkurang. Sebagai imbasnya, permintaan akan tenaga kerja justru akan meningkat karena perusahaan mampu memperluas operasinya dan meraih profit lebih besar berkat pemotongan ongkos tersebut. Pertambahan jumlah angkatan kerja juga membuka peluang bagi

lebih banyak orang untuk bekerja, selama nilai tukarnya cenderung stabil. Menurut pandangan klasik, kelebihan pasokan tenaga kerja akan membuat tarif upah menurun. Situasi ini pada akhirnya menekan biaya produksi perusahaan menjadi lebih rendah, sehingga dapat mendorong peningkatan laba (Badria, 2021). Lebih lanjut, dengan laba yang lebih besar, perusahaan punya kapabilitas untuk memperluas kapasitas produksinya, yang kemudian akan menciptakan permintaan baru untuk pekerja.

### 3. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan cara pandang kuantitatif, yaitu suatu teknik yang berfokus pada pengumpulan keterangan berwujud nominal, lalu dilanjutkan dengan pengujian statistik atas ihwal yang terkumpul. Informasi yang dipakai dalam telaah ini berupa data pihak kedua, artinya informasi tersebut sudah dikumpulkan dan diolah oleh entitas lain, mencakup Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas (APK SMA) dan Upah Minimum Provinsi (UMP)

Varietas data sekunder yang diterapkan dalam telaah ini berbentuk informasi yang dihimpun dalam kurun periode tertentu (deret waktu), yakni data pertahun dimulai dari 2015 sampai 2024. Informasi tersebut bersumber dari laman resmi Biro Pusat Statistik Daerah Maluku ([maluku.bps.go.id](http://maluku.bps.go.id)). Mengenai batasan pengertian, bagan dapat disimak pada Tabel 1 yang tertera di bawah ini:

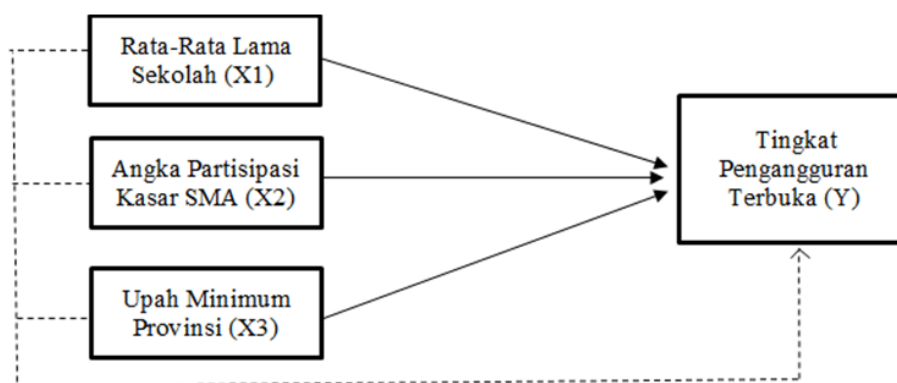
**Tabel 1.** Definisi Operasional Tabel.

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (Y)	Persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dicerminkan oleh tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah atau negara.	Persentase ( % )
2	Rata-rata Lama Sekolah (X1)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengukur durasi rata-rata tahunan pendidikan yang telah ditempuh oleh populasi berumur 25 tahun ke atas. Angka ini merepresentasikan berapa lama rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas telah melalui berbagai jenjang pendidikan.	Persentase ( % )
3	APK Sekolah Menengah Atas (X2)	Untuk jenjang sekolah menengah atas, Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang memperlihatkan proporsi populasi yang usianya masuk dalam kelompok usia sekolah menengah atas (16	Persentase ( % )

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
		hingga 18 tahun).	
4	Upah Minimum Provinsi (X3)	Upah minimum provinsi adalah patokan gaji bulanan terendah yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah sebagai panduan bagi pemberi kerja atau sektor industri dalam memberikan kompensasi kepada pekerja mereka.	Persentase (%)

Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Adapun desain penelitian ini dapat disajikan pada gambar berikut ini:



**Gambar 1.** Desain Penelitian.

Pada penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan karena mampu menginterpretasikan dan menjelaskan variabel-variabel bebas yang signifikan terhadap variabel terikat. Berikut adalah model analisis dari regresi linear berganda:

$$Y = \alpha - \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (2)$$

Dimana Y adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),  $\alpha$  adalah konstanta  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  adalah koefisien masing-masing variabel, X1 adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), X2 adalah Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas (APK SMA), X3 adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan e adalah *Error Term*.

Menurut (Purba et al., 2021), uji asumsi klasik wajib dilaksanakan guna memastikan bahwa persamaan regresi yang digunakan layak dari perspektif ekonometrika. Dalam analisis ini, serangkaian pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas diadakan untuk menilai apakah sebaran data sampel benar-benar mengikuti distribusi normal. Sementara itu, uji autokorelasi berfungsi mengecek adanya keterkaitan antara nilai galat pada periode waktu sekarang dengan periode sebelumnya dalam model regresi linier. Pengujian multikolinearitas diperlukan karena salah satu prasyarat dalam analisis regresi adalah variabel-variabel bebas tidak boleh saling berkorelasi erat. Di sisi lain, uji heteroskedastisitas bertujuan mengevaluasi apakah varians residu dalam model regresi

menunjukkan ketidaksamaan antara satu observasi dengan observasi lainnya (Potabuga et al., 2024).

Saat dilakukan pemeriksaan awal menggunakan data mentah, terdeteksi adanya persoalan autokorelasi. Apabila autokorelasi teridentifikasi, model yang ada perlu diperbaiki. Untuk studi ini, dilakukan modifikasi melalui transformasi logaritma natural ( $\ln$ ) sebagai upaya mengatasi masalah autokorelasi sehingga estimasi hasil regresi dapat memenuhi kriteria asumsi klasik. Jika setelah transformasi tersebut autokorelasi masih tetap ada, maka akan diterapkan uji *Run Test*. Sebagaimana literatur terdahulu (Nazima, 2019), peneliti menerapkan uji *Run Test* sebagai pemeriksaan tambahan untuk memastikan data bebas dari autokorelasi. Hasil dari pengujian *Run Test* mengindikasikan bahwa model sudah memenuhi semua asumsi klasik yang disyaratkan.

Setelah model dinyatakan memenuhi uji asumsi klasik, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian signifikansi dalam penelitian ini dilakukan secara parsial dan simultan dengan metode statistik pada tingkat signifikansi 5%. Keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis nol ( $H_0$ ) didasarkan pada perbandingan nilai *p-value* dengan  $\alpha$  (0.05). Apabila nilai signifikansi (*p-value*) lebih besar dari  $\alpha$ , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak; sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$ , maka  $H_0$  ditolak. Penelitian ini juga menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen secara keseluruhan. Jumlah variabel dalam model relatif terbatas sehingga perbedaan antara *R-Square* dan *Adjusted R-Square* tidak signifikan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

**Tabel 2.** Hasil Estimasi Linear Berganda.

<b>Dependent Variable: LOGTPT</b>				
<b>Method: Least Squares</b>				
<b>Date: 02/06/26 Time: 13:12</b>				
<b>Sample: 2015 2024</b>				
<b>Included observations: 10</b>				
<b>Variable</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
<b>C</b>	12.88420	5.678271	2.269036	<b>0.0638</b>
<b>LOGRLS</b>	-3.332764	1.125870	-2.960167	<b>0.0253</b>
<b>LOGSMA</b>	0.832050	1.328603	0.626259	<b>0.5542</b>
<b>LOGUMP</b>	-0.002622	0.018593	-0.141034	<b>0.8925</b>

<b>R-squared</b>	<b>0.647929</b>	Mean dependent var	1.995929
Adjusted R-squared	0.471893	S.D. dependent var	0.154468
S.E. of regression	0.112253	Akaike info criterion	-1.246946
Sum squared resid	0.075605	Schwarz criterion	-1.125912
Log likelihood	10.23473	Hannan-Quinn criter.	-1.379720
F-statistic	3.680669	Durbin-Watson stat	3.155256
<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0.081811</b>		

*Sumber: Hasil olah data Eviews 13, tahun 2026.*

Berdasarkan tabel 2, hasil estimasi regresi berganda menunjukkan bahwa nilai *probability* variabel rata-rata lama sekolah (X1) sebesar 0.0253 yang artinya lebih kecil daripada tingkat alpha 0.05, sehingga variabel rata-rata lama sekolah (X1) memiliki pengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka (Y). Variabel angka partisipasi kasar SMA (X2) memiliki nilai *probability* sebesar 0.5542 yang artinya lebih besar daripada nilai alpha 0.05, sehingga variabel angka partisipasi kasar SMA (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka (Y). Variabel upah minimum Provinsi (X3) memiliki nilai *probability* sebesar 0.8925 yang artinya lebih besar daripada nilai tingkat alpa 0.05 sehingga variabel upah minimum provinsi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka (Y).

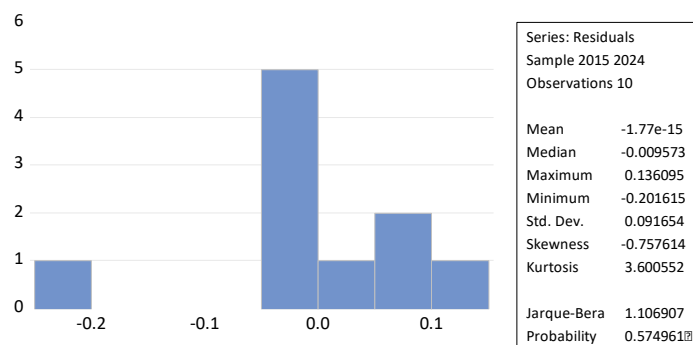
$$TPT_t = 12.88420 - 3.332764 \text{LOG}(\text{RLS}_t) + 0.832050 \text{LOG}(\text{APK SMA}_t) - 0.002622 \text{LOG}(\text{UMP}_t) + e$$

berdasarkan hasil estimasi dapat dilihat bahwa:

- Nilai koefisien rata-rata lama sekolah sebesar 3.332764 artinya jika variabel rata-rata lama sekolah naik sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 3.333% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
- Nilai koefisien angka partisipasi kasar SMA sebesar 0.832050 artinya jika variabel angka partisipasi kasar SMA naik sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar 0.832% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
- Nilai upah minimum provinsi sebesar 0.002622 artinya jika variabel upah minimum provinsi naik sebesar 1% maka tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0.002% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

## Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas



**Gambar 2.** Uji Normalitas.

Sumber: Hasil olah data Eviews 13, tahun 2026.

Berdasarkan gambar, hasil dari uji normalitas menunjukkan nilai *Jarque-Bera* sebesar 1.106907 dengan nilai *probability* sebesar 0.574961 dimana  $> 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  tidak dapat ditolak yang berarti data terdistribusi normal.

### b. Uji Autokorelasi

**Tabel 3.** Uji Autokorelasi Menggunakan *Run Test*.

R1	8.000000
R2	0.122258

Sumber: Hasil olah data Eviews 13, tahun 2026

Berdasarkan tabel 3, hasil dari uji autokorelasi menggunakan *Run Test* dengan nilai  $R_2$  (*p-value*) 0.122258  $> 0.05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak,  $H_a$  tidak dapat ditolak yang berarti model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi dapat teratasi menggunakan uji *Run Test*, maka pengujian asumsi klasik dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

### c. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.** Uji Multikolinearitas.

Variance Inflation Factors			
Date: 02/06/26 Time: 13:12			
Sample: 2015 2024			
Included observations: 10			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VF
C	28.13046	22334.55	NA
LOGRLS	1.267643	5231.982	1.605218
LOGSMA	1.764434	28896.14	1.485986
LOGUMP	0.000346	1.674829	1.258803

Sumber: Hasil olah data Eviews 13, tahun 2026.

Berdasarkan tabel 4, hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai  $VIF < 10$  dimana rata-rata lama sekolah (X1) sebesar 1.605218, angka partisipasi kasar SMA (X2) sebesar 1.485986, dan upah minimum provinsi (X3) sebesar 1.258803. Oleh karena itu,  $H_0$  tidak dapat ditolak dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak terdapat multikolinearitas.

#### **d. Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 5.** Uji Heteroskedastisitas.

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
<b>F-statistic</b>	1.236914	Prob. F(3,6)	0.3758
<b>Obs*R-squared</b>	3.821276	Prob. Chi-Square(3)	0.2814
<b>Scaled explained SS</b>	1.788737	Prob. Chi-Square(3)	0.6174

*Sumber: Hasil olah data Eviews 13, tahun 2025.*

Berdasarkan tabel 5, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai dari *Obs\*R-squared* adalah sebesar 3.821276 dengan nilai Prob. *Chi-Square* sebesar 0.2814 artinya nilai *Probability Chi-Square*  $> \alpha$  (0.05) sehingga  $H_0$  tidak dapat ditolak dan  $H_a$  ditolak, yang artinya di dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

#### **Uji Hipotesis**

##### **a. Uji Parsial (Uji t)**

**Tabel 6.** Uji T-Statistik.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.88420	5.678271	2.269036	0.0638
LOGRLS	-3.332764	1.125870	-2.960167	0.0253
LOGSMA	0.832050	1.328603	0.626259	0.5542
LOGUMP	-0.002622	0.018593	-0.141034	0.8925

*Sumber: Hasil olah data Eviews 13, tahun 2025.*

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh pada tabel 6, maka pembuktian dari hipotesis yang telah diuraikan adalah :

- a) Nilai probabilitas variabel Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 0.0253 lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  tidak dapat ditolak.
- b) Nilai probabilitas variabel Angka Partisipasi Kasar SMA sebesar 0.5542 lebih besar dari  $\alpha$  (0.05) yang berarti  $H_0$  tidak dapat ditolak dan  $H_1$  ditolak.
- c) Nilai probabilitas t-statistik variabel Upah Minimum provinsi sebesar 0.8925 lebih besar dari  $\alpha$  (0.05) yang berarti  $H_0$  tidak dapat ditolak dan  $H_1$  ditolak.

**b. Uji Simultan (Uji F)****Tabel 7.** Uji F-Statistik.

<b>F-statistic</b>	3.680669
<b>Prob(F-statistic)</b>	0.081811

*Sumber: Hasil olah data Eviews 13, tahun 2025.*

Dari tabel 7, nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0.081811, dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0.081706 > \alpha$ ) maka  $H_0$  tidak dapat ditolak dan  $H_a$  ditolak. Ini berarti secara simultan variabel rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar SMA upah minimum provinsi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

**c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )****Tabel 8.** Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

<b>R-squared</b>	0.647929
<b>Adjusted R-squared</b>	0.471893

*Sumber: Hasil olah data Eviews 13, tahun 2026.*

Dari tabel 8, tingkat koefisien determinasi *R-square* sebesar 0.647929 atau 64,8%. Ini berarti variabel rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar SMA dan upah minimum provinsi berpengaruh terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 64,8%, sedangkan sisanya sebesar 35,2% dipengaruhi oleh variabel lain.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa secara parsial Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.0253 < 0.05$  berpengaruh negatif dan signifikan. Angka Partisipasi Kasar SMA (APK SMA) memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.5542 > 0.05$  berpengaruh positif dan tidak signifikan. Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.8925 > 0.05$  berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Maluku. Secara simultan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar SMA (APK SMA) dan upah minimum provinsi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka sebesar 64,8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian sebesar 35,2%.

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi pengangguran, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kondisi kewirausahaan. Penelitian dengan metode kualitatif juga dapat

dilakukan untuk memahami secara mendalam penyebab tingginya mismatch antara pendidikan dan pasar kerja di Provinsi Maluku.

## DAFTAR REFERENSI

- Adi, P., & Suherman. (2021). Analisis determinan pengangguran terbuka Provinsi Jambi. *Jurnal Development*, 9(2), 105–113. <https://doi.org/10.53978/jd.v9i2.177>
- Afifah, D., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh tingkat pendidikan dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 2(3), 89–101. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i3.51314>
- Aqilah, J. T. F., Fadila, H. N., Adinta, F. N., & Sihombing, R. D. M. (2024). Analisis determinan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Maluku tahun 2018–2022. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 234–243. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i5.4102>
- Badria, F. A. (2021). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Indonesia tahun 2011–2020* (pp. 1–83). Repositori IAIN Ponorogo.
- Belinda, F. C. (2023). *Analisis pengaruh kenaikan upah minimum, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011–2021*. Universitas Islam Indonesia. <http://dspace.uui.ac.id/123456789/45434>
- Gani, E. S. (2015). Sistem perlindungan upah di Indonesia. *Jurnal Tahkim*, 11(1), 127–143. <https://doi.org/10.33477/thk.v11i1.10>
- Indrawati, I. S., & Harsono, I. (2025). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah terhadap pengangguran Provinsi NTB. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 4(1), 134–147. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.214>
- Mustakim, A., Ferlin, & Rizal. (2022). Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Kendari tahun 2010–2021. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 2(3), 209–216. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.140>
- Nazima, R. (2019). *Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan manajemen, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko* (pp. 1–111).
- Potabuga, M. L., Rorong, I. F. P. R., & Siwu, H. F. D. (2024). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(6), 85–98. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/57695>
- Purba, D. S., Tarigan, W. J., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan penggunaan software SPSS dalam pengolahan regresi linear berganda untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Karya Abadi*, 5(2), 202–208. <https://doi.org/10.22437/jkam.v5i2.15257>
- Rahim, A., Haryadi, W., & Muliawansyah, D. (2024). Analisis faktor rata-rata lama sekolah dan pengangguran terbuka dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 14–25. <https://doi.org/10.58406/jeb.v12i1.1528>
- Rahmadina, R. P., Ratna, M., & Budiantara, I. N. (2021). Pemodelan faktor yang memengaruhi angka partisipasi kasar SMA/ sederajat di Papua menggunakan regresi nonparametrik

spline truncated. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 10(1), D1–D8.  
<https://doi.org/10.12962/j23373520.v10i1.53334>

Suryana, Y., & Pradana, R. S. (2023). Angka partisipasi kasar perguruan tinggi, SMA, dan SMP menurut provinsi dan menurut gender serta hubungannya dengan tingkat pengangguran terbuka. *Jurnal Kewidyaiswaraan*, 8(1), 29–37.  
<https://doi.org/10.56971/jwi.v8i1.270>

Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. *Journal of Applied Business and Economic*, 5(4), 340–350.  
<https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4183>

Triantoro, P. (2021). *Analisis pengaruh upah minimum provinsi dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2015–2019*. <https://repository.radenintan.ac.id/19317/>